



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N

NOMOR : PENGUMUMAN / 14938 / KP / 09 / 2018 / 03
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2018.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

| No. | Jabatan Fungsional | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | | | Jumlah formasi | Unit Kerja Penempatan |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|---|
| | | | Umum | Cum laude | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | | |
| 1. | Diplomat | S-1 Ilmu Hubungan Internasional | 29 | 10 | 1 | 40 | 1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 6. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 7. Direktorat Jenderal Protokol dan |

| No. | Jabatan Fungsional | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | | | Jumlah formasi | Unit Kerja Penempatan |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|
| | | | Umum | Cum laude | Putra/Putri Papua dan Papua Barat | | |
| | | | | | | | Konsuler 8. Sekretariat Jenderal |
| | | S-1 Ilmu Hukum | 18 | 3 | - | 21 | 1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 7. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 8. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional |
| | | S-1 Ilmu Politik | 6 | - | - | 6 | 1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 5. Sekretariat Jenderal |
| | | S-1 Ilmu Ekonomi | 8 | - | - | 8 | 1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 7. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Jepang | 1 | - | - | 1 | Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Tiongkok | 1 | - | - | 1 | Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Rusia | 1 | - | - | 1 | Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa |

| No. | Jabatan Fungsional | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | | | Jumlah formasi | Unit Kerja Penempatan |
|--------------|--|---|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|---|
| | | | Umum | Cum laude | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | | |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Arab | 7 | - | - | 7 | 1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Perancis | 1 | - | - | 1 | Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Inggris | 4 | - | - | 1 | 1. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 3. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 4. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |
| | | S-1 Ilmu Budaya/Sastra Jerman | 1 | - | - | 1 | Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa |
| | | S-1 Ilmu Komunikasi | 4 | - | 1 | 5 | 1. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 2. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler |
| | | S-2 Ilmu Hubungan Internasional | 2 | - | - | 2 | Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |
| | | S-2 Ilmu Hukum | 2 | - | - | 2 | Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional |
| 2. | Auditor | S-1 Akuntansi | 10 | - | - | 10 | Inspektorat Jenderal |
| 3. | Perencana | S-1 Akuntansi | 4 | - | - | 4 | Sekretariat Jenderal |
| | | S-1 Manajemen | 2 | - | - | 2 | Sekretariat Jenderal |
| 4. | Analisis Kepegawaian | S-1 Manajemen | 3 | - | - | 3 | Sekretariat Jenderal |
| | | S-1 Ilmu Administrasi Negara/ Administrasi Negara/ Manajemen dan Kebijakan Publik | 2 | - | - | 2 | Sekretariat Jenderal |
| 5. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | S-1 Ilmu Hukum | 2 | - | - | 2 | Sekretariat Jenderal |
| 6. | Pustakawan | S-1 Ilmu Perpustakaan | 1 | - | - | 1 | Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |
| 7. | Pranata Komputer | S-1 Teknik Informatika | 1 | - | - | 1 | Sekretariat Jenderal |
| TOTAL | | | 110 | 13 | 2 | 125 | |

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri adalah dikhususkan bagi putra/putri lulusan jenjang pendidikan Strata 1 dengan predikat “dengan pujian (*cumlaude*)” dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan keterangan lulus “dengan pujian (*cumlaude*)” pada ijazah atau transkrip nilai.
 - b. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua atau Papua Barat yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
 - c. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk pada kriteria sebagaimana huruf a dan b di atas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada tanggal pendaftaran secara daring di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan berusia maksimum:
 - a. 28 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada tanggal 1 Desember 2018 untuk Sarjana (S-1);
 - b. 32 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada tanggal 1 Desember 2018 untuk tingkat Magister/Master (S-2);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah, termasuk di negara/wilayah yang rawan secara politik, ekonomi maupun keamanan.
11. Bersedia tidak mengundurkan diri selama mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional dan menjalani ikatan dinas selama 5 (lima) tahun sejak selesai diklat.



V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Diplomat (DIP)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) atau master/magister (S-2) sebagai berikut.
 - 1) S-1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Budaya/Sastra (Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, Jerman, Jepang), atau Ilmu Komunikasi.
 - 2) S-2 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, atau Ilmu Hukum.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK sarjana (S-1) dan master/magister (S-2) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri, baik melalui jalur umum maupun jalur *cumlaude*, yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri melalui jalur *cumlaude* juga telah memperoleh surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya dengan pujian (*Cumlaude*) yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan nilai TOEFL sebesar 550 (lima ratus lima puluh) atau IELTS sebesar 6.5 (enam titik lima). Untuk bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis) dan/atau bahasa asing lainnya (Jerman dan Jepang) dibuktikan dengan nilai tes bahasa yang setara dengan nilai TOEFL 550.

2. Auditor (AUD)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Akuntansi.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

3. Perencana (PRC)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Akuntansi atau Manajemen.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

4. Analis Kepegawaian (AK)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Manajemen atau Ilmu Administrasi Negara/Administrasi Negara/ Manajemen dan Kebijakan Publik .
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan (PPUU)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Ilmu Hukum.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

6. Pustakawan (PUS)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Ilmu Perpustakaan.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

7. Pranata Komputer (PK)

- a. Memiliki ijazah sarjana (S-1) jurusan Teknik Informatika.
- b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan persyaratan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4. Untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan/atau sertifikat bahasa asing lainnya (Arab, Tiongkok, Rusia, Perancis, Jerman, atau Jepang).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pendaftaran secara daring dibuka pada tanggal 26 September 2018 pukul 00.01 WIB dan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jabatan, dan berkas lamaran yang dikirimkan adalah sebagai berikut.
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Luar Negeri di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).

- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi pelamar dari dalam negeri, atau fotokopi paspor dan izin tinggal yang masih berlaku bagi pelamar dari luar negeri.
 - c. Satu lembar fotokopi ijazah (S-1 atau S-2) berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisasi (**cap basah dan tanda tangan asli**). Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan fotokopi penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah dilegalisasi (**cap basah dan tanda tangan asli**).
 - d. Untuk peserta jalur putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) dari perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan fotokopi penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya dengan pujian (*Cumlaude*) yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah dilegalisasi (**cap basah dan tanda tangan asli**).
 - e. **Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak diterima.**
 - d. Untuk peserta jalur Putra/Putri Papua dan Papua Barat wajib melengkapi persyaratan dokumen fotokopi KTP orang tua (bapak atau ibu) dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua atau Papua Barat.
 - e. Surat Pernyataan Menyetujui Ketentuan dan Syarat yang telah dibubuhi materai Rp. 6.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format surat pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).
 - f. Daftar Riwayat Hidup terakhir sesuai dengan format yang telah disediakan, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format daftar riwayat hidup dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).
 - g. Fotokopi Akte Kelahiran.
 - h. Pas foto terbaru berlatar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (berwarna) sebanyak 4 lembar. Harap tuliskan nama pelamar di bagian belakang foto.
 - i. Lembar bukti pendaftaran yang dicetak dari laman <https://sscn.bkn.go.id>.
 - j. Sertifikat TOEFL atau hasil tes bahasa lainnya yang disyaratkan pada poin V.
4. Pelamar wajib mengirimkan berkas lamaran sesuai pada butir 4 di atas melalui **PO BOX 3036 JKP 10030**. Pengiriman melalui alamat selain ke PO BOX 3036 JKP 10030 **tidak diterima dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi**.
 5. Dokumen yang harus disampaikan pada tahap akhir (ujian wawancara substansi/tes psikologi) sebagai berikut:
 - a. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Asli Surat Keterangan Pencari Kerja (Kartu Kuning).
 6. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses lebih lanjut.
 7. Pelamar diminta untuk tidak melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang tersebut pada butir 3.
 8. Batas waktu penerimaan berkas lamaran pada PO.BOX **paling lambat** diterima pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB dengan cap pos tanggal 11 Oktober 2018.

VIII. TAHAPAN DAN SISTEM SELEKSI

1. Tahapan seleksi

Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS Kemenlu dilaksanakan dengan tahapan yang sangat ketat, dimana selain harus lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pelamar akan melewati tahapan-tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut.

| No. | Tahapan Seleksi | Kode Jabatan Fungsional | |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | | DIP | AUD, PRC, AK, PPUU, PUS, PK |
| 1. | Seleksi Administrasi | √ | √ |
| 2. | Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) | √ | √ |
| 3. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): | | |
| | a. Ujian kemampuan bahasa asing | √ | X |
| | b. Ujian tulis substansi menggunakan CAT BKN | √ | √ |
| | c. Ujian essay substansi dan wawancara substansi | √ | √ |
| 4. | Tes Kesehatan+ tes tertulis dan wawancara psikologi | √ | √ |
| Keterangan | | √ : ada X : tidak ada | |

2. Sistem penilaian

| No. | Tahapan Seleksi | Bobot Nilai | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|
| | | DIP | AUD, PRC, AK, PPUU, PUS, PK |
| 1. | Seleksi Administrasi | Sistem gugur | Sistem gugur |
| 2. | Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN | $N \times 40\%$ | $N \times 40\%$ |
| 3. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): | $(A + B + C) \times 60\%$ | $(B + C) \times 60\%$ |
| | a. Ujian kemampuan bahasa asing | $A = (N \times 25\%)$ | Tidak ada |
| | b. Ujian tulis substansi menggunakan CAT BKN | $B = (N \times 50\%)$ | $B = (N \times 55\%)$ |
| | c. Ujian essay substansi dan wawancara substansi | $C = (N \times 25\%)$ | $C = (N \times 45\%)$ |
| 4. | Tes kesehatan + tes tertulis dan wawancara psikologi | Sistem gugur | Sistem gugur |

3. Sistem kelulusan masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang dikirimkan ke **PO BOX 3036 JKP 10030** dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran dengan sistem gugur. Pengiriman melalui alamat selain ke PO BOX 3036 JKP 10030 **tidak diterima dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.**
- b. Kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta secara peringkat tidak melebihi tiga kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan yang tersedia.
- c. Kelulusan seleksi kompetensi bidang (SKB) jabatan fungsional diplomat didasarkan pada hasil ujian kemampuan bahasa asing dengan nilai sebesar 25%, ujian tulis substansi menggunakan CAT dengan nilai sebesar 50%, dan ujian essay substansi dan wawancara substansi dengan nilai sebesar 25%.
- d. Kelulusan seleksi kompetensi bidang (SKB) jabatan fungsional Auditor, Perencana, Analis Kepegawaian, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pustakawan,

- Pranata Komputer didasarkan pada hasil ujian tulis substansi menggunakan CAT dengan nilai sebesar 55% dan wawancara substansi dengan nilai sebesar 45%.
- e. Kelulusan tes kesehatan didasarkan pada hasil tes kesehatan fisik, tes tertulis dan wawancara psikologi yang dilakukan oleh tenaga profesional dengan sistem gugur.
 - f. Kelulusan akhir seluruh jabatan ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD, SKB dan tes kesehatan dengan bobot penilaian hasil SKD sebesar 40%, hasil SKB sebesar 60% dan tes kesehatan dengan sistem gugur.
4. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>.

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

| No. | Tahapan | Jabatan | Jadwal |
|-----|--|---------------|---------------------------|
| 1. | Pengumuman Penerimaan | Semua Jabatan | 19 September – 3 Oktober |
| 2. | Pendaftaran Online dan Seleksi Administrasi | Semua Jabatan | 26 September – 10 Oktober |
| 3. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | Semua Jabatan | 15 - 16 Oktober |
| 4. | Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Semua Jabatan | 22 Oktober – 2 November |
| 5. | Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Semua Jabatan | 6 November |
| 6. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 1: Ujian Tulis Substansi Menggunakan CAT dan Essay | Semua Jabatan | 12 November |
| 7. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 2: Ujian Kemampuan Bahasa Asing | Diplomat | 13 November |
| 8. | Tes Kesehatan 1: Tes Tertulis Psikologi | Semua Jabatan | 14 November |
| 9. | Tes Kesehatan 2: Wawancara Psikologi | Semua Jabatan | 15 – 16 November |
| 10. | Tes Kesehatan 3: Kesehatan Fisik | Semua Jabatan | 15 – 19 November |
| 11. | Pengumuman Hasil Tes Kesehatan | Semua Jabatan | 22 November |
| 12. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 3: Wawancara Substansi | Semua Jabatan | 26 – 28 November |
| 13. | Pengumuman Hasil Akhir | Semua Jabatan | 1 Desember |

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>.

X. LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri.
2. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 tidak mengadakan surat-menyurat.
3. Kementerian Luar Negeri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri atau Panitia.
4. Diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>. Para Pelamar diwajibkan untuk terus memantau situs dimaksud.
6. Bagi peserta yang lulus setiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Peserta yang tidak hadir pada tahap seleksi berikutnya dinyatakan **GUGUR**.
7. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi, tetapi mengundurkan diri dikenakan sanksi dengan diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** untuk disetorkan kepada Kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler.
8. Selain butir 7 diatas, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
9. Lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri sebelum ditayangkannya pengumuman ini dianggap tidak berlaku.
10. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan Pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Kementerian Luar Negeri, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
12. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, selama mengikuti pendidikan, peserta Diklat tidak diperkenankan mengambil cuti dan bersedia menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri.
13. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 hanya diterima pada alamat surat elektronik: **keluhandansaran@kemlu.go.id**.

Jakarta, 18 September 2018

A.n. MENTERI LUAR NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL

